indonesiana by TEMPO
Cari berita
Mulai Menulis

Rachmad Rofik
Penulis Indonesiana

Saya adalah penulis independen yang tertarik pada isu ekonomi, kebijakan publik, dan dinamika regulasi yang berdampak langsung pada masyarakat. Dengan latar belakang di bidang teknologi dan ekonomi digital, saya berupaya membaca kebijakan tidak hanya dari teks, tetapi juga dari implikasinya di lapangan. Melalui tulisan, saya mendorong diskursus yang rasional, berbasis data, dan seimbang. Kritik disampaikan secara konstruktif, dengan tujuan membuka ruang dialog dan memperkuat pemahaman publik terhadap persoalan ekonomi dan tata kelola. Bagi saya, menulis adalah cara sederhana untuk menjaga kewarasan publik--tenang, tertib, tapi tetap berpikir ke depan. | Rachmadrofik.github.io | Wxj.my.id

SAL, Bank Negara, dan Ujian Asas Kehati-hatian

Apakah pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) ini masih sejalan dengan prinsip hukum keuangan negara?

Kamis, 1 Januari 2026 11:53 WIB

Bagikan Artikel Ini

Menyukai Artikel 0

Tutup Iklan X

© ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/tom.

indonesiana by TEMPO
Mulai Menulis

Rp 276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan di perbankan dimaksudkan untuk menegaskan bahwa likuiditas tetap beredar di perekonomian. Dana itu, kata Purbaya, “ditarik lalu dibelanjakan kembali”. Namun, di balik narasi teknokratis tersebut, terdapat persoalan yang lebih fundamental: **apakah pengelolaan SAL ini masih sejalan dengan prinsip hukum keuangan negara?**

SAL bukan sekadar kas menganggur. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAL adalah bagian dari keuangan negara yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menempatkan kehati-hatian sebagai roh pengelolaan kas negara.

Masalah muncul ketika SAL digunakan sebagai instrumen penempatan dana besar-besaran di perbankan. Penempatan Rp 276 triliun ke bank—terutama bank-bank milik negara—memang tidak otomatis melanggar hukum. Namun, secara desain kebijakan, langkah ini menggeser fungsi SAL dari penyangga fiskal menjadi instrumen intervensi likuiditas, tanpa mekanisme akuntabilitas yang setara dengan belanja APBN.

Perbedaan ini krusial. Belanja negara tunduk pada proses politik dan hukum yang ketat: pembahasan DPR, klasifikasi fungsi, hingga audit berbasis kinerja. Sebaliknya, penempatan dana di bank lebih bersifat administratif dan teknis. Ketika kredit perbankan hanya tumbuh 7,36 persen (yoy) per Oktober 2025, muncul pertanyaan hukum dan kebijakan: **di mana letak efektivitas penggunaan keuangan negara tersebut?**

Asas kehati-hatian menuntut negara tidak hanya memastikan dana aman, tetapi juga memastikan tujuan kebijakan tercapai. Jika dana ditempatkan untuk

indonesiana by TEMPO
Mulai Menulis

kebijakan fiskal.

Persoalan semakin sensitif ketika dikaitkan dengan struktur penerima dana. Mayoritas SAL ditempatkan di bank-bank Himbara—Mandiri, BRI, BNI, BTN—yang notabene dimiliki negara. Di sinilah potensi conflict of interest struktural muncul. Negara bertindak sekaligus sebagai pemilik bank, pengatur kebijakan fiskal, dan penempat dana. Tanpa pagar kebijakan yang tegas, kepentingan stabilitas dan profitabilitas bank berpotensi mengalahkan tujuan publik untuk mendorong sektor riil.

Dalam perspektif hukum keuangan negara, konflik kepentingan tidak selalu berarti pelanggaran hukum pidana. Namun, ia menjadi masalah serius ketika **keputusan fiskal lebih menguntungkan entitas yang dimiliki negara sendiri**, sementara manfaat ekonominya bagi publik tidak terukur. Prinsip “value for money” yang melekat dalam pengelolaan keuangan negara menjadi kabur.

Pengakuan Menkeu tentang ketidaksinkronan kebijakan dengan Bank Indonesia memperkuat kritik ini. Penempatan dana dilakukan ketika transmisi moneter belum siap. Artinya, kebijakan fiskal dijalankan tanpa kepastian bahwa instrumen pendukungnya efektif. Dalam logika hukum administrasi negara, ini mencerminkan cacat perencanaan kebijakan (policy design failure)—bukan sekadar masalah teknis.

Optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi 2026 bisa mencapai 6 persen patut diapresiasi sebagai target. Namun, dalam kerangka hukum keuangan negara, optimisme harus ditopang oleh mekanisme yang akuntabel dan terukur. Tanpa syarat penyaluran kredit yang jelas, tanpa indikator kinerja penggunaan SAL, dan tanpa evaluasi terbuka, kebijakan ini berisiko menjadi ilusi pertumbuhan yang mahal.

Masalah ekonomi Indonesia saat ini bukan kekurangan dana, melainkan kegagalan memastikan keuangan

indonesiana by TEMPO

Mulai Menulis

jalurnya harus jelas: belanja produktif, insentif terukur, dan kebijakan yang tunduk pada prinsip akuntabilitas publik.

Jika target 6 persen kelak tidak tercapai, publik berhak bertanya: apakah kegagalannya karena faktor eksternal, atau karena sejak awal desain kebijakan keuangan negara terlalu longgar terhadap risiko konflik kepentingan dan pengaburan tujuan? Dalam negara hukum, pertanyaan semacam ini bukan sikap sinis, melainkan bagian dari pengawasan demokratis atas pengelolaan uang rakyat.

#kemenkeu

Bagikan Artikel Ini

Menyukai Artikel 0

Rachmad Rofik
Penulis Indonesiana

11 Pengikut

+ Ikuti Penulis

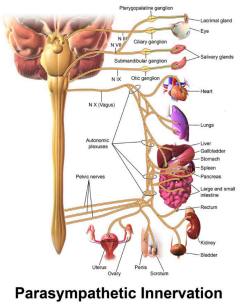

Zikir Napas dan Koherensi Jantung

1 hari lalu

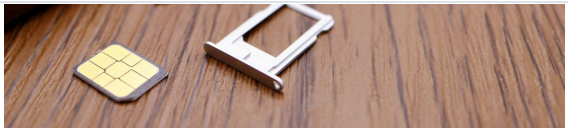

Bongkar Muslihat Kuota Hangus: 80 Halaman Perlawanan Rachmad Rofik di MKRI

Senin, 9 Februari 2026 17:43 WIB

Lihat Semua Artikel

Baca Juga

Eliyas Yahya
Penulis Indonesiana, Website developer yang sudah...

Yudo Sadewo: Menkeu Agen CIA, Rakyat Indonesia Miskin,

Penulis Indonesiana, Website developer yang sudah membuat berbagai jenis Web di Indonesia - Kamis, 11 September 2025 07:23 WIB

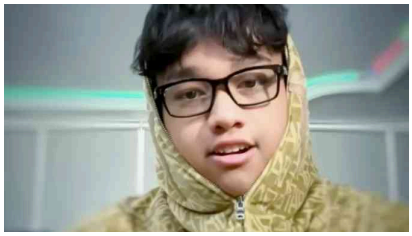

Yudo Sadewo mengatakan: Masyarakatnya udah miskin, banyak Protes, pengen cepat kaya, gak mau diambil duitnya. ...

0

Artikel Terpopuler

Muhamad Jaesa
Engineer Energi Terbarukan

Berita Pilihan

Tenaga Surya Seharusnya Jadi Masa Depan Energi Indonesia

Engineer Energi Terbarukan - 3 hari lalu

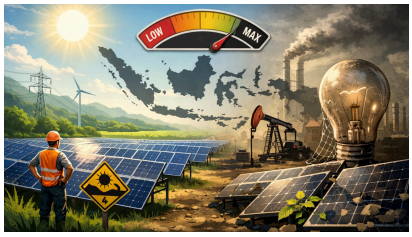

Energi surya mampu menyuplai lebih kebutuhan listrik nasional. Sayang belum dikembangkan secara optimal dan kapasitas terpasang baru 1 persen...

0

Penulis Indonesiana - 6 jam lalu

UMS raih dua ITAY 2026 untuk kinerja kampus dan kepemimpinan rektor, perkuat posisi sebagai universitas Islam berkelas dunia...

0

Adrianus Safarin
Penulis Indonesiana

Berita Pilihan

Dari A sampai Z Kekacauan Program Makanan Bergizi

Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

Kekacauan program MBG karena kepemimpinan yang tak kompeten, praktik koncoisme dan nepotisme, serta orientasi politik jangka pendek...

0

Desha Setiardi, MBA
Penulis Indonesiana

Bisnis di Era Disrupsi: antara Ketahanan, Inovasi, dan

Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

Dalam konteks Indonesia, karakteristik pasar domestik, struktur ekonomi beragam, serta kesiapan digital yang tidak merata perlu jadi perhatian...

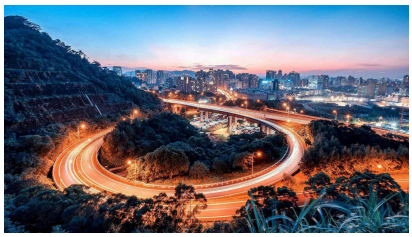

1

Ramdansyah Ramdansyah
Penulis Indonesiana

Habitus, Doxa, dan Kontroversi Ijazah

Penulis Indonesiana - Selasa, 17 Februari 2026 18:18 WIB

Derau dugaan ijazah palsu Presiden RI ke 7 akan terus eksis di ruang publik selama

Gunoto Saparie
Penulis Indonesiana

Pentingnya Kolaborasi Pusat, Daerah, dan Komunitas

Penulis Indonesiana - 3 hari lalu

Selama ini kebijakan kebudayaan sering bergerak dari atas ke bawah, sementara kebudayaan sendiri tumbuh dari bawah ke atas....

0

Heri Mirhan
Penulis Indonesiana

Perbedaan Awal Puasa Ikhtilaf Pembawa Rahmat

Penulis Indonesiana - Selasa, 17 Februari 2026 18:19 WIB

Ikhtilaf dalam perkara furu'iyah cabang hukum bukanlah cacat dalam agama. Ia adalah ruang dinamika yang menunjukkan elastisitas hukum...

0

Atfal Nuril Abdul Ghani
Penulis Indonesiana

Urgensi Pengaturan Debt Collector sebagai Upaya

Penulis Indonesiana - 8 jam lalu

Regulasi debt collector mendesak guna menjamin kepastian hukum, perlindungan HAM, dan tanggung jawab negara dalam praktik penagihan utang....

0

Wahyu Triono KS
Ahli dan Praktisi Kebijakan Publik

Berita Pilihan

bernapas, ia cermin bangsa, menegur kuasa, menyalakan harapan republik adil, beradab, bermartabat....

0

Indrato Sumantoro
Pemerhati Aspal Buton

The Buton Effect: Dari Buton Untuk Dunia (Bab 3)

Pemerhati Aspal Buton - 3 hari lalu

The Buton Effect menantang para pemimpin untuk memilih keberanian atau kenyamanan. ...

1

Artikel Terbaru

Siapkah Pariwisata Indonesia Bersaing di Panggung Dunia?

6 jam lalu

Menguji Politik Bebas Aktif di Tengah Pusaran Gaza

6 jam lalu

Implementasi Sistem Merit Diperkuat, LAN RI Gelar Uji Kompetensi

6 jam lalu

Kegagapan Bahasa dan Kelahiran Makna

7 jam lalu

Tubuh Basah, Tawa Pecah: Ritual Perang Air di Hari Puncak

6 jam lalu

Lihat semua

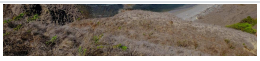

6 jam lalu

Menguji Politik Bebas Aktif di Tengah Pusaran Gaza

6 jam lalu

Kegagapan Bahasa dan Kelahiran Makna

7 jam lalu

Strategi Penguatan Koperasi Desa Merah Putih Percepat

7 jam lalu

Benarkan Asupan Nutrisi Lebih Terjamin dan Bantu Kelompok

7 jam lalu

Lihat semua

Terpopuler di Analisis

Bisnis di Era Disrupsi: antara Ketahanan, Inovasi, dan

2 hari lalu

Habitus, Doxa, dan Kontroversi Ijazah

Selasa, 17 Februari 2026 18:18 WIB

Pentingnya Kolaborasi Pusat, Daerah, dan Komunitas Budaya

3 hari lalu

Perbedaan Awal Puasa Ikhtilaf Pembawa Rahmat

Selasa, 17 Februari 2026 18:19 WIB

indonesiana by TEMPO

Mulai Menulis

Lihat semua

Informasi

Ketentuan Konten

Q&A Seputar Indonesiana.id

Jaringan Media

TEMPO.CO

Koran Tempo

Majalah Tempo

Tempo English Magazine

TEMPO.CO English

Tempo Store

Tempo Institute

Home

Analisis

Catatan Dari Palmerah

Fiksi

Hiburan

Humaniora

Sport

Pendidikan

Sosial Media

Download Aplikasi Tempo

Download on the App Store

GET IT ON Google Play